

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung merupakan lembaga pendidikan tinggi yang bertugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian, pada masyarakat. Ketiga Dharma tersebut dituntut berorientasi pada visi, misi dan tujuan Universitas. Untuk mencapai cita-cita tersebut, semua Civitas Akademika dituntut secara konsisten secara bersama-sama untuk melaksanakan visi, misi serta tujuan tersebut secara sinergis, dinamis, sistematis dan konstruktif.¹

Berkenaan dengan itu, diperlukan Organisasi Kemahasiswaan Intra Universitas yang berfungsi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendikiaan, dan integritas kepribadian mahasiswa menuju terciptanya tujuan pendidikan nasional yang berkualitas. Dengan demikian, Organisasi Kemahasiswaan Intra Universitas bertugas melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang bersifat ekstrakurikuler meliputi kepemimpinan, penalaran minat dan bakat mahasiswanya.

Segala bentuk kegiatan mahasiswa harus mendapat perhatian dari birokrasi kampus, agar terciptanya keselarasan visi misi Universitas dengan kegiatan yang dilakukan organisasi intra kampus. Setiap kegiatan organisasi intra kampus harus

¹POKI *Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Intra*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016), h. 1.

mendapatkan pengawasan dan pengapresiasian oleh pihak birokrasi kampus agar tetap terjaga keharmonisan antara birokrasi kampus dan organisasi intra yang ada di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Untuk memenuhi fungsi dan tugasnya, Organisasi Kemahasiswaan Intra Universitas diniscayakan dapat menyelenggarakan kegiatan yang terkelola dengan baik, pengelolaan yang baik dan optimal dapat terjadi bila pedoman tata kelola organisasi kemahasiswaan disusun secara baik, sistematis yang memenuhi berbagai dinamika, tuntutan dan kebutuhan mahasiswa.

Secara umum, mahasiswa merupakan orang yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi baik negeri atau swasta yang berperan aktif sebagai *agent of change*, *agent social of control* dan *iron stock*. Mahasiswa sebagai insan akademis harus mampu merefleksikan ilmu kajiannya terhadap masyarakat sebagai wujud tanggung jawab moral atas predikat yang diembannya. Salah satu wujud pengembangan diri organisasi intra kampus hadir sebagai jembatan awal pengaktualisasian mahasiswa menuju kualitas diri yang lebih baik. Dalam organisasi intra kita akan mendapatkan ilmu yang tidak ada dalam bangku kuliah.

Adanya organisasi intra kampus baik di tingkat Universitas sampai jurusan harus bisa mewadahi segala aspek yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan harus mempunyai orientasi sebagai landasan awal bagi para pelakunya guna menentukan arah gerak, pola aktivitas serta tujuan organisasi. Mahasiswa sebagai insan akademis harus mampu merumuskan peran dan identitasnya. Sebagai insan akademis, mahasiswa harus mampu mengembangkan diri untuk menjadi bagian dari struktur masyarakat masa depan

yang berkualitas. Serta dituntut untuk mengikuti tabiat dasar ilmu itu sendiri, yaitu sadar, mencari, dan membela nilai kebenaran ilmiah. Secara sadar tuntutan ini mengarah pada peran mahasiswa untuk mengkritisi dan ikut menata kehidupan masyarakat bangsanya dengan dasar nilai-nilai moral dan akademik. Peran itulah yang harus dijalankan untuk mewujudkan sosok utuh mahasiswa.

Berproses dalam organisasi kemahasiswaan merupakan hak bagi setiap mahasiswa. Seperti diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 77 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan bahwa :

1. Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
2. Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk:
 - a. mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa;
 - b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
 - c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan
 - d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi intra Perguruan Tinggi.

Organisasi intra kampus dipandang perlu sebagai proses pembelajaran untuk mahasiswa, serta berperan aktif dalam menyalurkan aspek-aspek tertentu, seperti pengawal kebijakan, penyalur aspirasi, dan lain sebagainya. Kehadiran organisasi mahasiswa intra kampus seharusnya bisa mencapai fungsi diatas, tetapi pada

realitanya sebagian organisasi intra yang ada di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung jarang melakukan fungsinya dengan baik.

Sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan di organisasi intra kampus yang mengakibatkan krisis kepercayaan di kalangan mahasiswa terhadap calon pemimpin intra kampus. Sistem tata kelola organisasi intra kampus yang sering disalahgunakan wewenangnya oleh sebagian oknum yang ada di organisasi intra membuat sebagian mahasiswa menjadi tidak *respect* terhadap sebagian organisasi intra. Terbukti dengan adanya Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Intra (POKI) tetap saja tidak dijadikan sebagai wujud landasan hukum bagi organisasi intra yang ada di kampus.

Ketidakhadiran organisasi intra tertinggi ditingkatan Universitas menjadikan surutnya demokrasi mahasiswa, kurang lebih selama 3 tahun Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung kekosongan sosok pemimpin tingkat Universitas. Terbukti dengan tidak adanya organisasi tertinggi di tingkat Universitas yaitu Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U) dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menjadikan sistem tata kelola organisasi intra kampus yang kurang baik, sampai dengan permasalahan mahasiswa yang kurang pengawasan dari 2 lembaga tersebut.

Salah satu permasalahan yang terlihat oleh mahasiswa terhadap organisasi intra sering menyalahgunakan wewenang mereka serta tidak menggunakan produk hukum yang ada. Kurangnya pengawasan atau kontrol dari organisasi intra tertinggi menjadikan cacatnya tata kelola organisasi intra kampus yang ada di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Dari tujuan didirikannya organisasi intra kampus mahasiswa di setiap Universitas, Institut, maupun di sekolah-sekolah tinggi di seluruh Indonesia untuk membantu para mahasiswa mengembangkan diri di bidang akademik maupun non-akademik. Akan tetapi fenomena yang terjadi belakangan ini di kebanyakan kampus-kampus yang ada, organisasi intra mahasiswa justru keluar dari jalur atau visi kelembagaannya itu sendiri.

Ketidakhadiran pimpinan Universitas intra kampus Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U) dalam waktu 3 tahun kebelakang, yakni tahun 2015 dan 2016 bahkan sampai akhir 2017 ini menjadi permasalahan yang besar.

Hadirnya SEMA-U setelah musyawarah tingkat tinggi (MUSTI-U) pada bulan Oktober 2017 menetapkan Acep Jamaludin sebagai Ketua Umum terpilih. Hal ini menjadikan sesuatu yang dinantikan oleh seluruh mahasiswa UIN SGD Bandung karena Senat Mahasiswa Universitas yang pada awalnya adalah lembaga eksekutif sekarang menjadi lembaga legislatif yang mempunyai fungsi *controlling*, *budgetting* dan *legislasi*.

Meski sekarang lembaga eksekutif tertinggi DEMA-U belum terbentuk, setidaknya SEMA-U hadir untuk merancang sistem tata kelola organisasi intra ke arah yang lebih baik. Karena pada hakikatnya sebuah struktur dari *top*, *middle* dan *low* harus tetap sinergis pada aturan dan roda-roda organisasi yang ada. Terkhusus SEMA-U dalam salah satu fungsinya yaitu mengontrol.

Berdasarkan paparan diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh mengenai tata kelola organisasi intra kampus oleh Senat Mahasiswa Universitas

dan penulis tuangkan dalam judul: *Keterlibatan Senat Mahasiswa Universitas dalam Tata Kelola Organisasi Intra Kampus (Studi Kasus: kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Senat mahasiswa universitas sebagai lembaga tertinggi di tingkat kampus harus mampu berperan aktif dalam menjalankan peran dan fungsinya. Fungsi *controlling*, *budgetting* dan *legislasi* harus dilaksanakan dengan serius oleh Senat Mahasiswa Universitas agar terciptanya tata kelola yang baik, karena dalam kenyataannya selalu ada permasalahan dalam menjalankan fungsi organisasi intra dalam tata kelola organisasi intra kampus baik tingkatan Universitas, Fakultas sampai Jurusan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apa peran dan Fungsi SEMA-U di Lingkungan Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung?
2. Bagaimana strategi SEMA-U dalam membenahi tata kelola organisasi intra yang ada di Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung?

3. Apa langkah-langkah SEMA-U dalam membenahi tata kelola organisasi intra yang ada di Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui peran dan Fungsi SEMA-U di Lingkungan Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Untuk mengetahui strategi SEMA-U dalam membenahi tata kelola organisasi intra yang ada di Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Untuk mengetahui langkah-langkah SEMA-U dalam membenahi tata kelola organisasi intra yang ada di Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung

1.5 Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian yang telah dilakukan dapat berguna bagi:

1.5.1 Kegunaan Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keilmuan dan pembuktian teori ilmu sosial yang sudah ada, serta salah satu syarat untuk mengikuti ujian seminar proposal pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dan untuk

mengetahui peran dan fungsi Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) dalam tata kelola organisasi intra kampus.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan refleksi bagi mahasiswa, untuk membuka pandangan terhadap segala bentuk pengelolaan organisasi intra kampus.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan. Kerangka konsep disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, Teori Birokrasi Max Weber diambil untuk melihat peran dan fungsi SEMA-U dalam tata kelola organisasi intra kampus.

Problematika yang terjadi tentang tata kelola organisasi intra kampus bisa disangkut-pautkan dengan teori birokrasi Max Weber. Salah satu pandangan Weber tentang birokrasi adalah sebagai berikut :

Dalam menjalankan roda-roda organisasi sering terjadi patologi (penyakit) birokrasi. Karena menciptakan *good goverment* harus melalui proses yang panjang. Birokrasi merupakan suatu sistem pengorganisasian negara dengan tugas yang sangat kompleks dan hal ini jelas memerlukan pengendalian operasi manajemen pemerintahan yang baik. Sangatlah disayangkan, apabila kerja rutinitas aparat birokrasi sering menyebabkan masalah baru yang menjadikan birokrasi statis

dan kurang peka terhadap perubahan lingkungan bahkan terkesan cenderung resisten terhadap pembaharuan.

Kondisi seperti ini seringkali memunculkan potensi praktek mal-administrasi yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bermula dari kondisi tersebut maka pemerintah pusat maupun daerah perlu segera melakukan reformasi birokrasi yang tidak hanya pada tataran komitmen saja tetapi juga dilandaskan dalam tataran kehidupan nyata.

Lebih lanjut Max Weber mengemukakan bahwa prinsip aplikasi konsepsi birokrasi dalam jabatan terdapat dua hal, yaitu:

1. Latihan jabatan harus merupakan program yang wajib untuk menduduki jabatan pada periode tertentu.
2. Jabatan personal dalam suatu instansi harus berpolakan:
 - a. Hendaknya mempunyai dan menikmati suatu *social extrem* yang dapat dibedakan dengan yang dilayani, bagi jabatan sosial dijamin oleh tata aturan dan bagi jabatan politik dijamin oleh ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bentuk jabatan birokratik yang asli harus diangkat oleh pejabat yang berwenang lebih tinggi untuk mengangkatnya.
 - c. Dalam keadaan normal jabatan tersebut dipegang sepanjang hidup.
 - d. Para pejabat menerima gaji yang teratur dan pasti.
 - e. Jabatan disusun untuk suatu karier dalam tata jenjang hierarki pada instansi pemerintah.

Sebagian organisasi intra di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung biasanya mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat euforia semata dan cenderung tidak mempunyai substansi. Mahasiswa sebagai *agent of change*, *agent of control* seharusnya mampu melihat fenomena sosial yang ada di lingkungannya. Mahasiswa harus peka terhadap apa yang dibutuhkan disekelilingnya.²

Max Weber menciptakan model tipe ideal birokrasi yang menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Tipe ideal itu menurutnya bisa dipergunakan untuk membandingkan birokrasi antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Menurut Max Weber bahwa tipe ideal birokrasi yang rasional tersebut dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut:

Pertama, individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya. *Kedua*, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. *Ketiga*, tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya. *Keempat*, setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas (*job description*) masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak.

²Thoha Miftah dan Agus Dharma, *Menyoal Birokrasi Publik*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 45.

Kelima, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif. *Keenam*, setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu. *Ketujuh*, terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang obyektif. *Kedelapan*, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. *Kesembilan*, setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.³

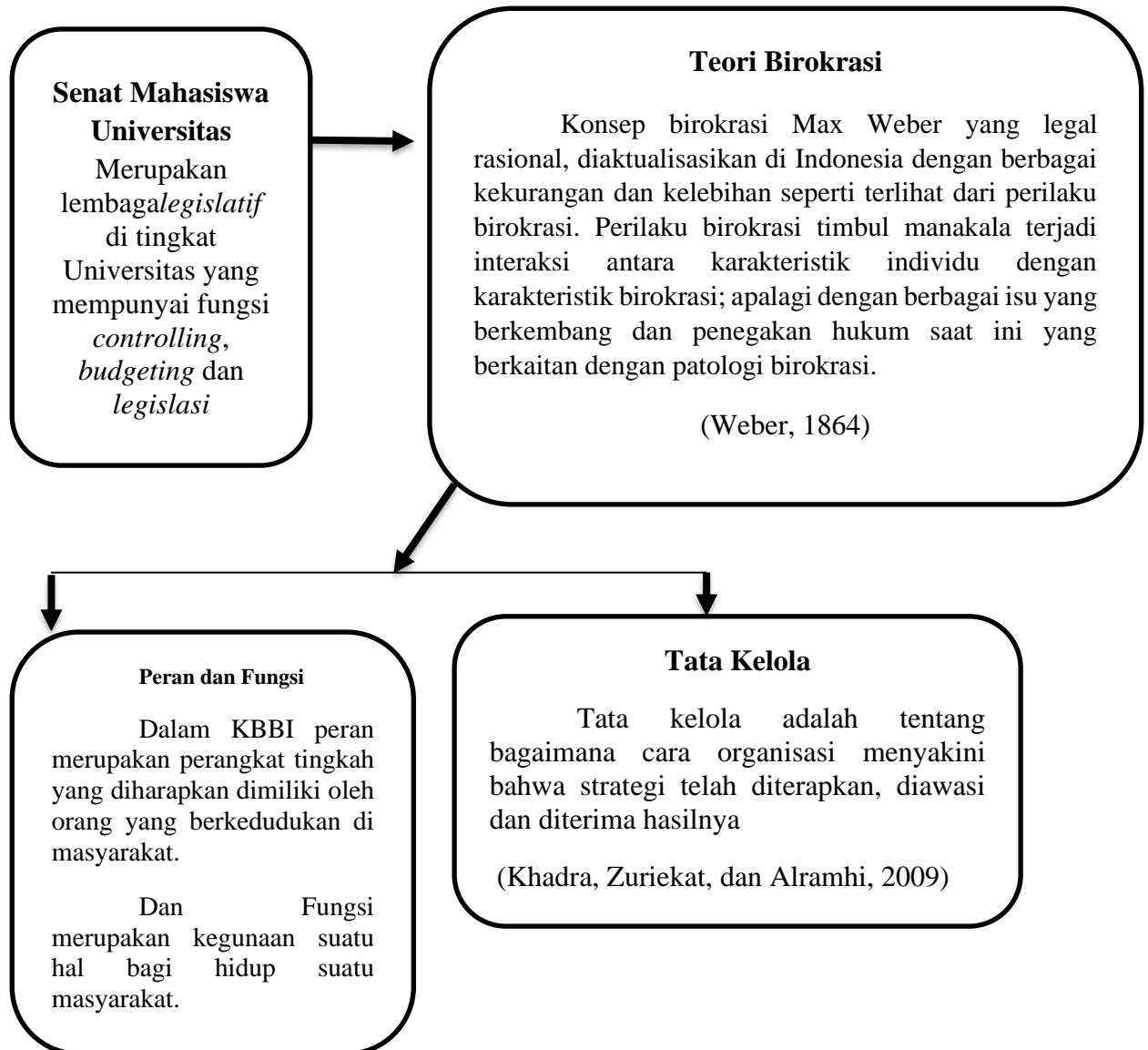
Teori di atas digunakan untuk menganalisis peran dan fungsi sema universitas dalam tata kelola organisasi intra kampus di kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Peran dan Fungsi Sema-U yang akan disoroti dan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana SEMA-U bisa mengelola sistem organisasi ke arah yang lebih baik dan sejauh mana efesiensi dan efektifitasnya terhadap tata kelola organisasi intra kampus.

Penelitian ini akan mendeskripsikan secara jelas mengenai kondisi fungsi SEMA-U dalam tata kelola organisasi intra kampus yang terjadi di kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

³*Ibid*, h. 45

Gambar 1

Skema Konseptual



Sumber: Modifikasi Penulis